

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

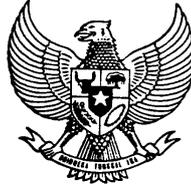
**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 148/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN 2021**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

JAKARTA,

JUMAT, 13 AGUSTUS 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 148/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Pesisir Selatan Tahun 2021

PEMOHON

Hendrajoni, Hamdanus

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Jumat, 13 Agustus 2021, Pukul 13.55 WIB – 14.39 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Fransisca

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Zenwen Pador
2. Oktavianus Rizwa
3. Muhammad Arif

B. Termohon:

1. Lili Suarni (KPU Kabupaten Pesisir Selatan)
2. Febriani (KPU Kabupaten Pesisir Selatan)

C. Kuasa Hukum Termohon:

1. Sudi Prayitno
2. Jhony Hendra Putra

D. Bawaslu:

1. Erman Wadison (Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan)
2. Yani Rahmasari (Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan)
3. Arieski Elfandi (Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan)
4. Nurmaidi (Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan)
5. Syafrijal Chan (Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan)

***Tanda baca dalam risalah:**

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.55 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kita mulai. Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang dalam Perkara Nomor 148/PHP.BUP-XIX/2021 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, ini ketemu terus ini ya, jadinya ya, Pilkada yang enggak selesai-selesai ini.

Baik, saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Pemohon, siapa yang hadir? Silakan, Pemohon! Siapa yang hadir? Baik secara luring maupun secara daring. Siapa yang hadir secara luring ini? Silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENWEN PADOR

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Kami dari Pihak Pemohon Perkara 148/PHP.BUP-XIX/2021, hari ini hadir kuasa substitusi, Yang Mulia, untuk di luring ini. Yang di daring kemungkinan Oktavianus Rizwa, Yang Mulia. Saya sendiri sebagai kuasa substitusi dari Muhammad Arif. Nama saya Zenwen Pador, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ada ya, Surat Kuasa substitusinya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENWEN PADOR

Ada, Yang Mulia. Ini baru saya bawa, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Nanti diserahkan ke Panitera. Tolong diambil, Petugas! Ini Pak Zenwen Pador, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENWEN PADOR

Betul, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Menggantikan Muhammad Arif?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENWEN PADOR

Ya.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pak Oktavianus?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENWEN PADOR

Pak Oktavianus daring rencananya, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Daring?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENWEN PADOR

Ya.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus, ini ada Prinsipal 2 orang?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENWEN PADOR

Saya belum dapat informasinya hadir apa enggak hari ini, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, baik. Terima kasih. KPU, siapa yang hadir? Silakan!

16. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Assalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikum salam wr. wb.

18. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir dari Pihak Termohon secara luring, kuasanya saya Sudi Prayitno, S.H. L.L.M. bersama Ibu Lili Suarni.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Coba, Pak Sudi, ya?

20. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Sudi Prayitno, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, ya. Terus?

22. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Bersama Ibu Lili Suarni, S.H. M.H. Korbid Hukum KPU Pesisir Selatan.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

24. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Kemudian, secara daring hadir Kuasa Termohon, Bapak Jhoni Hendry Putra, S.H dan Komisioner KPU Pesisir Selatan Ibu Febriani, S.Ip., M.Ip. Demikian. Terima kasih.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu yang hadir secara daring di mana itu?

26. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Di KPU, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Di KPU Jakarta?

28. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Ya, benar.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Bawaslu, siapa yang hadir? Silakan!

30. BAWASLU: YANI RAHMASARI

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikum salam wr. wb.

32. BAWASLU: YANI RAHMASARI

Yang hadir secara luring, saya Yani Rahmasari adalah Kordiv Hukum Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.

Yang hadir secara daring adalah Ketua, Bapak Erman Wadison, Bapak Arieski Elfandi, Bapak Syafrijal Chan, dan Bapak Nurmaidi. Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih. Ya, ini persidangan yang pertama. Dalam persidangan pertama, kita akan meminta penjelasan dari permohonan ini secara lisan. Permohonan secara tertulis sudah diterima di Kepaniteraan ya, pada tanggal 3 Agustus, ya. Betul? Oke, oke. Ini di sini permohonan Anda diterima di hari Selasa, 3 Agustus 2021, pukul 13.00 WIB. Kemudian, ada perbaikan permohonannya diterima hari Kamis, 29 Juli ... perbaikan permohonan ini, ya? Ya, 29 Juli? Ini yang mau dibacakan permohonan yang mana ini masalahnya? Bagaimana, Pak?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENWEN PADOR

Pastinya yang perbaikan, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Perbaikan. Perbaikan itu yang mana?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENWEN PADOR

Yang (...)

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Per tanggal berapa?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENWEN PADOR

28 Juli 2021, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

29 Juli, toh. Ya, ini Oktavianus Rizwa, S.H. and Partner Law Firm?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENWEN PADOR

Ya, betul, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Padang, 29 Juli 2021. Yang ini? Supaya jelas dulu!

42. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENWEN PADOR

Mohon maaf, Yang Mulia. Ini yang saya pegang 28 Juli 2021, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Aduh, bagaimana? Substitusi enggak jelas ini. Coba, ada ... anu ... yang hadir secara daring?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIANUS RIZWA

Saya, Yang Mulia, Oktavianus Rizwa.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, bagaimana?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIANUS RIZWA

Kita mendaftarkan pada 29 Juli karena sebelumnya kita bikin di tanggal 28 Juli, pas tanggal 28 Juli.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi ini ada permohonan yang tertanggal 29 Juli 2021, terus kemudian (...)

48. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIANUS RIZWA

28 Juli, Pak Ketua ... Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIANUS RIZWA

28 Juli.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak ada ini, tertanggal 29 yang kami terima. Gimana? Ini supaya jelas, supaya KPU dan Bawaslu juga mengerti bahwa permohonan ini permohonan yang mana.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIANUS RIZWA

28 Juli, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, ini ada dua ini, coba! Coba yang mana dianukan itu Kuasanya, yang mana yang mau dipakai itu? Ada yang 22, ada yang ... yang mau dipakai ini yang diterima di Mahkamah pada tanggal Rabu, 28 Juli 2021, pukul 16.00 sore ini, betul?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIANUS RIZWA

Ya, 28 Juli, ya.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, jadi ini yang dipakai, ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIANUS RIZWA

Ya, Yang Mulia. 28 Juli.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Termohon terima, enggak, yang ini?

58. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Yang kami terima itu yang 22 Juli. Yang diregister 22 Juli. Kemudian, yang kedua yang tanggal 29 Juli dan itu yang perbaikannya, Yang Mulia, yang di tanggal 29 Juli itu diterima oleh Kepaniteraan.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Anda enggak terima yang tanggal 28?

60. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Tidak ada, Yang Mulia.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Coba ini ditunjukkan. Ini diterima enggak, ini, Pemohon? Supaya kita tahu persis. Itu di atas ada tanggal 28. Ada?

62. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Tidak ada, Yang Mulia.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak ada?

64. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Enggak ada, yang 22 Juli dengan yang 29 Juli.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, sekarang saya tanya untuk penegasan dari Pemohon. Yang dipakai yang tertanggal 28 atau 29?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Yang 29 Juli, Yang Mulia.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha? Lho, gimana? Tadi katanya 28, sekarang 29. Gimana? Ini kuasanya tiga-tiganya jadi kacau semua, enggak jelas ini. Atau mau dicabut kalau enggak jelas begini.

68. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Izin, Yang Mulia. Jadi (...)

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini siapa yang bicara ini namanya? Muhammad Arif?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Muhammad Arif, Yang Mulia.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Yang kita daftarkan pertama itu yang melalui online itu yang tanggal 22 Juli.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT

22?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Ya.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Kemudian, atas ... apa ... Panitera, diminta memasukkan yang aslinya itu tertanggal 28 Juli. Nah, kemudian perbaikannya terakhir tertanggal 29 Juli, Yang Mulia.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sekarang makanya kita enggak usah lihat yang mana, tapi yang terakhir yang mau dipakai, yang mau dibacakan itu yang tertanggal berapa?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Yang terakhir, Yang Mulia.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tanggal 29?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Ya.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, ini yang anu, ya, sudah ya?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Sebenarnya tanggalnya saja yang beda, Yang Mulia, isinya tetap sama, 28 dan 29.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ya, enggak begitu, yang dipakai itu isinya sama atau tidak sama, kita enggak lihat. Tapi tanggal yang mana dulu karena tanggalnya macam-macam ini.

84. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Yang tanggal 29, Yang Mulia.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau Kuasa Hukum begini kasihan Prinsipalnya, kan, kok enggak profesional begini. Ya? Ketegasan, saya minta ketegasan. Siapa yang memutus ini? Arif ... Muhammad Arif, Oktavianus, atau Zenwen?

86. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIANUS RIZWA

29 Juli, Yang Mulia, saya Oktavianus Rizwa.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang memutus siapa? Memutuskan siapa sekarang?

88. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIANUS RIZWA

29 Juli, Ketua.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Siapa? Yang ngomong ini siapa ini?

90. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIANUS RIZWA

Oktavianus Rizwa.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oktavianus, ya, yang memutuskan. Betul, Pak Muhammad Arif?

92. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Ya, betul, Yang Mulia.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tanggal 29?

94. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Ya.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Zenwen tanggal 29, ya?

96. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENWEN PADOR

Baik, Yang Mulia, ada misinformasi, Yang Mulia.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kita pakai yang 29 berarti.

98. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENWEN PADOR

Mohon maaf, ya.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, KPU, 29, ya? Yang lain tidak dipakai. Meskipun kita enggak tahu isinya sama atau tidak sama, tapi yang dipakai sekarang yang tanggal 29. Terus kemudian, Bawaslu tahu, ya, tanggal 29, ya.

Baik, sekarang yang akan menyampaikan permohonannya secara lisan siapa? Zenwen atau yang secara daring?

100. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENWEN PADOR

Mohon maaf, Yang Mulia, karena saya tidak pegang yang 29, mungkin saya mohon ke Muhammad Arif untuk bisa sampaikan, Yang Mulia.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang menyampaikan Muhammad Arif? Siapa yang akan menyampaikan? Ha? Pak Oktavianus atau Pak Muhammad Arif yang mau menyampaikan? Gimana ini?

102. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Oktavianus Rizwa, Yang Mulia.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ya. Pak Oktavianus berarti, ya?

104. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Ya.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan! Pak Oktavianus, secara ringkas.

106. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIANUS RIZWA

Terima kasih, Yang Mulia.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

108. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIANUS RIZWA

Saya akan sampaikan ringkasan permohonan.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Enggak usah dibacakan semua, yang tidak dibacakan dianggap telah dibacakan, ya.

110. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIANUS RIZWA

Ya, ya, terima kasih, Yang Mulia.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang menjadi objek dalam permohonan ini apa?

112. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIANUS RIZWA

Keputusan KPU ... objek permohonan adalah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan (...)

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He em.

114. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIANUS RIZWA

Nomor 259/PT.02.3-Kpt/1381/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 itu, Yang Mulia.

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus? Yang mengajukan? Identitas yang mengajukan permohonan siapa, Prinsipal?

116. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIANUS RIZWA

Permohonan diajukan oleh ... permohonan diajukan oleh satu, Bapak Hj. Hendrajoni, S.H., M.H.

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus yang kedua?

118. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIANUS RIZWA

Dan kemudian Bapak ... dan pasangannya Bapak Hamdanus, S.Fil.L, M.Si.

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Ini orang ... dua orang ini sebagai apa?

120. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIANUS RIZWA

Sebagai bupati dan wakil bupati, pasangan bupati dan wakil bupati.

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pasangan calon, ya, masih calon kan? Calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020. Terus kemudian memberi Kuasa kepada tiga orang, Oktavianus Rizwa, Muhammad Arif, dan kemudian Kuasa Substitusinya diberikan ke Pak Zenwen Pador, betul?

122. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIANUS RIZWA

Benar, Yang Mulia.

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini Harry Syaputra masih sebagai kuasa atau sudah tidak?

124. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIANUS RIZWA

Harry Syaputra, sampai sekarang masih, Yang Mulia.

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Masih. Jadi, tidak hadir? Yang hadir secara luring ... yang hadir secara daring Pak Oktavianus sama Pak Muhammad? Pak Harry, hadir enggak?

126. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIANUS RIZWA

Enggak hadir, Yang Mulia.

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak hadir, tapi kemudian memberi kuasa substitusi kepada Pak Zenwen, ya?

128. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIANUS RIZWA

Zenwen Pador.

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

130. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIANUS RIZWA

Ya.

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus yang menjadi gugatan ini, yang dipersoalkan tadi? Putusan KPU?

132. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIANUS RIZWA

Ya.

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KPU mana itu yang digugat? Yang dijadikan Termohon?

134. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIANUS RIZWA

Pesisir Selatan, Yang Mulia.

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Komisi Pemilihan umum Pesisir Selatan (...)

136. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIANUS RIZWA

Kabupaten Pesisir Selatan.

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bagaimana mengenai kewenangan Mahkamah?

138. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIANUS RIZWA

Saya akan bacakan, Yang Mulia.

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan! Mahkamah berwenang, enggak?

140. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIANUS RIZWA

Kedudukan hukum Pemohon. Pokok-pokok permohonan.

Bahwa permohonan ini didasari oleh adanya pelanggaran administrasi pemilihan yang telah dilakukan oleh calon Bupati Nomor Urut 2, Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd., yang bertentangan ... yang bertentangan dengan dengan keberadaan kebenaran materiil hukum, moral, dan konstitusionalitas pada Pemilihan Calon Kepala Daerah Pesisir Selatan Tahun 2020, sehingga mengakibatkan Pemilihan Calon Kepala Daerah Pesisir Selatan Tahun 2020 telah jauh menyimpang dari penyelenggaraan pemilihan yang jujur dan adil.

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

142. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIANUS RIZWA

Sebagai ... ya, Yang Mulia?

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, teruskan!

144. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIANUS RIZWA

Sebagai peraih suara terbanyak kedua, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, Pemohon mengajukan permohonan ini karena alasan telah terdapat cacat hukum secara formil dan pelanggaran bersyarat yang wajib (...)

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Engak, anu dulu, coba jangan sampai ke pokok permohonannya dulu, sekarang coba tenggang waktunya, bagaimana pengajuan permohonan? Tenggang waktunya bagaimana?

146. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIANUS RIZWA

Tenggang waktu pengajuan permohonan. Bahwa menurut Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 ... Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 hari kerja terhitung sejak dicantumkan penetapan ... penetapan suara hasil pemilihan oleh KPU kabupaten/kota. Dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Arif, Ketua.

147. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Ya, terus sekarang menyangkut pokok permohonannya, ada persoalan apa? Jadi yang Anda persoalkan itu perselisihan hasil suara atau apa? Bukan?

148. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Yang kita persoalkan itu tentang keterpenuhan persyaratan calon, Yang Mulia, sejak dari proses awal pemilihan sampai akhir pemilihan. Sehingga dengan adanya ketentuan yang dilanggar berkaitan dengan syarat administrasi pencalonan ini berdampak terhadap hasil.

149. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ada ... ada persolan apa toh, mengenai perselisihan administrasi pencalonan?

150. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Yang pertama, itu soal status Calon Bupati Nomor Urut 2 dalam hal ini Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd., ketika sebelum melakukan pencalonan itu telah mengantongi ... telah berstatus sebagai terpidana dengan 2 putusan pengadilan, Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Tinggi Padang, dengan status terpidana telah melanggar perbuatan izin lingkungan.

151. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tindak pidana yang dilakukan tindak pidana apa?

152. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Tindak pidana kejahatan.

153. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kejahatan apa?

154. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Melakukan ... melakukan usaha tanpa mengantongi izin lingkungan.

155. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

156. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Pengrusakan mangrove.

157. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

158. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Ya.

159. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus pada waktu proses penetapan yang ... penetapan calon?

160. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Pada saat penetapan calon itu status calon bupati ini dia sedang melakukan proses kasasi di Mahkamah Agung.

161. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Jadi, pada waktu pencalonan yang ditetapkan oleh KPU pada waktu itu ... pasangan nomor urut berapa itu, Pak, yang digugat? Pasangan Nomor Urut 1, ya?

162. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Yang digugat Nomor Urut 2.

163. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nomor Urut 2?

164. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Ya.

165. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu putusannya sudah inkraht apa belum? Belum, ya?

166. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Yang inkraht itu (...)

167. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Masih dalam proses pengajuan kasasi?

168. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Ya, masih dalam proses pengajuan kasasi.

169. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

170. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Nah, di balik proses tersebut ada fakta-fakta administrasi lain, ada ... ada salah satu administrasi lain yang mesti harus dipenuhi oleh pasangan calon ini, salah satunya SKCK.

171. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

172. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Nah, di putusan ... apa itu ... di Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Padang tersebut yang telah menyatakan Calon Bupati Nomor Urut 2 ini bersalah melakukan tindak pidana perusakan lingkungan itu ada perintah terdakwa ini untuk ditahan, tapi faktanya yang bersangkutan tidak ditahan. Nah, dengan tidak ditahannya yang bersangkutan mengakibatkan ada dampak hukum lain yang berhubungan dengan administrasi, yaitu terbitnya SKCK, yang merupakan juga bagian dari salah satu syarat untuk pencalonan. Nah, SKCK itu berlakunya pun juga tidak sampai pada tahap pelantikan.

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, tapi waktu itu ada upaya hukum dari pasangan calon ... bupati ... Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 2 untuk melakukan upaya hukum kasasi, ya?

174. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Ya.

175. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Sehingga pencalonannya tidak gugur?

176. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Nah, sehingga pencalonannya waktu itu diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Pesisir Selatan.

177. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

178. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Jadi, ada 2 administrasi. Yang pertama, surat keterangan kepolisian SKCK, kemudian ada surat dari Pengadilan Negeri Painan.

179. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

180. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Nah, mungkin kita melihat ini maladministrasinya, salah satunya.

181. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, terus?

182. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Nah, kemudian setelah proses pencalonan yang bersangkutan diterima oleh KPU Pesisir Selatan, beliau mengikuti ... apa ... mengikuti proses, mengikuti pemilihan, dan ternyata proses kasasinya baru diregistrasi pada tanggal 5 Februari ... eh, 5 Januari 2021. Nah, terdapatlah pula rentang waktu yang lama. Ini kan berhubungan dengan proses kasasinya.

183. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

184. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Nah, ternyata putusan kasasi sudah keluar pada tanggal 24 Februari.

185. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

186. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Faktanya tanggal 24 Februari itu masih masuk dalam fase tahapan proses pemilihan dan beliau dilantik tanggal 26 Februari 2021 sebagai Bupati Pesisir Selatan.

187. KETUA: ARIEF HIDAYAT

2021. Jadi sekarang (...)

188. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Artinya (...)

189. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang sudah dilantik berarti tanggal 26 itu?

190. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Sekarang posisinya sudah dilantik.

191. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

192. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Jadi, 2 hari sebelum pelantikan dengan status terpidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pasangan ... Bupati Nomor Urut 2 tetap dilantik menjadi bupati.

193. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

194. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Nah, itu yang pertama, Majelis.

195. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu sudah anu, ya, kasus posisinya adalah kasus itu yang dipersoalkan, bukan perselisihan hasil suara, tapi Anda mempersoalkan mestinya pencalonan ini bisa gugur karena ada cacat?

196. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Ya, cacat administrasi.

197. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cacatnya mestinya karena calon bupatinya ini Nomor Urut 2 itu mestinya tidak dapat surat (...)

198. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

SKCK.

199. KETUA: ARIEF HIDAYAT

SKCK, ya? Surat (...)

200. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Ya.

201. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, tidak dapat SKCK. Nah, SKCK-nya dikeluarkan dari mana itu?

202. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Dari kepolisian.

203. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari kepolisian pada waktu proses pencalonan?

204. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Ya.

205. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Tapi karena waktu itu memang belum ada putusan pengadilan yang bersifat inkraht karena proses pengadilannya baru sampai ke Pengadilan Tinggi Sumatera Barat?

206. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Ya. Waktu itu sama yang (suara tidak terdengar jelas) kasasi.

207. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kemudian sudah ada Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat yang bersangkutan juga dinyatakan melakukan tindak pidana, terus kemudian yang bersangkutan mengajukan kasasi, gitu, ya?

208. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Ya, ya.

209. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian setelah kasasi, putusan kasasi dinyatakan dia bersalah, begitu?

210. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Ya.

211. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, jadi itu masih tetap berjalan terus, akhirnya yang bersangkutan tanggal 26 sudah dilantik. Jadi, sekarang sudah menjadi bupati dan wakil bupati ... pasangan ini sudah menjadi bupati dan wakil bupati, gitu, ya? Nah, sekarang (...)

212. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Tambahan, Yang Mulia.

213. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Peti ... apa? Tambahannya apa?

214. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Soal keterangan SKCK tadi itu. SKCK dikeluarkan 13 Agustus 2020.

215. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

216. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Sampai dengan 13 Februari 2021.

217. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

218. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Artinya, keberadaan SKCK secara administrasi itu juga sudah terlebih dahulu tidak berlaku sebelum putusan pengadilan ... sebelum putusan kasasi keluar.

219. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, ya. Sekarang Petitem Saudara minta apa?

220. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Petitem kita, Yang Mulia. Karena berhubungan yang kita persoalkan ... yang kita persoalkan itu adalah persyaratan pencalonan yang mestinya harus melekat pada diri calon semenjak dia mendaftar sampai akhir ... sampai pelantikan, yang mana ini merupakan bagian dari proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Maka oleh sebab itu, kita meminta:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Urut 2, Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd., dan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si., karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.
3. Menyatakan batal demi hukum Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk keperluan persyaratan pencalonan yang Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd., sebagai Calon Bupati Pesisir Selatan Periode 2021-2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Pesisir Selatan pada tanggal 13 Agustus 2020.

4. Menyatakan batal demi hukum Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259/PL.02.3-KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 pertanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pesisir Selatan Nomor 261/PL.02.3-KPT/1301/KPU Kabupaten-IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020 beserta lampirannya.
5. Menyatakan batal demi hukum Putusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.1-KPT/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020.
6. Menyatakan batal demi hukum Keputusan KPU Nomor 4/PL.02.7-KPT/1301/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 pascaputusan Mahkamah Konstitusi bertanggal 19 Februari 2021.
7. Menyatakan batal demi hukum pengesahan pengangkatan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd., dan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si., dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat.
8. Memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk mencabut Putusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Putusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat sepanjang mengenai pengangkatan Pasangan Calon Bupati Pesisir Selatan Tahun 2021.
9. Menetapkan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Hendrajoni, S.H., M.H., dan Hamdanus, S.Fil.I., M.Si., sebagai peraih suara terbanyak sekaligus sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020.
10. Memerintahkan Termohon, KPU Kabupaten Pesisir Selatan untuk melaksanakan putusan ini atau ... dibacakan yang poin perbaikannya, Yang Mulia?

221. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

222. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Sembilan. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Hendrajoni, S.H. (...)

223. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Gimana itu? Anda kok menetapkan suara terbanyak, padahal Anda enggak memperhitungkan ... apa ... perselisihan hasil? Kok di angka 9 ini Petitumnya kok menetapkan Pemohon sebagai peraih suara terbanyak? Anda kan enggak mempersoalkan itu, ya? Tapi dibacakan enggak apa-apa, silakan!

224. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Ya, soalnya 9 yang kedua.

225. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus?

226. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Sembilan. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Hendrajoni, S.H., M.H., dan Hamdanus, Fil.I., M.Si., dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Dedi Rahmanto Putra-Arfianof Rajab, S.E., tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd., dan Apt. Rudi Hariyansah, S.Si.

Memerintahkan Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

227. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

228. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Demikian, Majelis.

229. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Yang Mulia Prof. Enny, ada yang mau didalami? Silakan, Prof!

Oh, Yang Mulia Pak Manahan, ada yang akan didalami? Silakan! Kepada Pemohon.

230. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Jadi, kepada Kuasa Pemohon ini menurut Pemohon bahwa pasangan calon ini tidak memenuhi syarat, ya, untuk (...)

231. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Ya, Yang Mulia.

232. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, itu yang tidak dipenuhinya yang mana sebenarnya?

233. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Ada 2, Yang Mulia.

234. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, sebut saja!

235. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Yang pertama, syarat administrasi yang berhubungan dengan SKCK.

236. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Berhubungan dengan?

237. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

SKCK merupakan salah satu bagian dari syarat.

238. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, SKCK, ya, waktu persyaratan itu, ya?

239. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Ya, SKCK, ya, persyaratan pencalonan.

Yang kedua, status terpidananya Rusma Yul Anwar dengan tingkat sebelum dia dilantik.

240. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, kedua pada tingkat dia sudah dinyatakan terpidana 2 hari sebelum ... sebelum dilantik. Begitu, ya?

241. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Betul, Yang Mulia. Ya, Yang Mulia.

242. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi, itu. Dua ... dua momen itu, ya?

243. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Ya.

244. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Cukup, Yang Mulia.

245. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Prof. Ennny, silakan!

246. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, begini, Kuasa Pemohon, ya.

247. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Ya, Yang Mulia.

248. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini Kuasa Pemohon ini diberi kuasa oleh Prinsipalnya Pak Hendrajoni dan Hamdanus, ya?

249. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Ya, Yang Mulia.

250. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Betul. Sudah sering komunikasi mestinya bahwa Pak Hendrajoni maupun Hamdanus ini adalah pasangan calon yang pernah mengajukan Permohonan?

251. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Betul, Yang Mulia.

252. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Betul, ya? Sudah komunikasi soal itu? Jadi, ini sudah pernah diajukan oleh Prinsipal yang sama, Permohonan ini?

253. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Kuasanya berbeda, Yang Mulia.

254. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Waktu itu kuasanya mungkin belum ... kuasanya mungkin pada waktu itu Saudara, kan begitu?

255. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Ya, ya, kuasanya berbeda.

256. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nah, itu artinya ini sudah pernah diajukan. Tidak Saudara jelaskan mengapa sudah pernah diajukan, diajukan kembali, ya? Itu seolah-olah terputus rantainya, ya? Benang merahnya terputus atas perkara yang sudah diajukan untuk keputusan yang sama. Ini kan keputusan yang sama ini, Keputusan 368 Saudara ajukan kembali di sini, 368, ya.

257. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Ada ... ada buktinya, Yang Mulia.

258. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ha?

259. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Tapi konsepnya saya pikir ... saya pikir berbeda, Yang Mulia.

260. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, tetapi ini harus Anda ... Saudara jelaskan di sini, seolah-olah ini kayak baru, lho, terputus begitu, padahal kan tidak terputus ini, ya. Artinya Prinsipal yang sama itu telah menguasai dulunya, bukan kepada Saudara, terkait dengan keputusan yang sama dari KPU, Keputusan Nomor 368, ya. Ini mestinya Saudara juga kaitkan, ya. Ini enggak ada.

Kemudian, begini, kenapa ini kok kemudian ... ini kan terkait dengan inkraht-nya itu tanggal 24 Februari, ya?

261. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Ya, Yang Mulia.

262. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, 26 Februari baru dilantik. Anda kok mengajukannya baru bulan Juli ke sini, ke Mahkamah mengajukan kembali? Walaupun Anda memutuskan mata rantai antara permohonan sebelumnya itu. Ini tidak ada ininya, ya, tidak disampaikan mengapa itu ada kemudian ... apa namanya ... tidak dijelaskan adanya persoalan itu di sini, ya? Kenapa kok baru tiba-tiba, ujug-ujug di bulan Juli dan itu juga tadi ada berbagai macam permohonan, begitu, ya.

Nah, ini yang saya mencoba meraba-raba ini kalau orang baru baca pertama ini, "Oh kayaknya perkara baru ini."

Padahal sudah diajukan oleh Prinsipal yang sama untuk perkara yang pernah diputus juga dan kemudian tiba-tiba kok baru mengajukannya sekarang, begitu lho. Ya, ini artinya perlunya mestinya Saudara jelaskan juga lebih jauh di situ, ya, tapi karena bukan perkara pengujian undang-undang, ya, saya tidak bisa memberi nasihat lebih jauh soal itu. Tetapi nanti Anda silakan tambahkan bukti-bukti yang menguatkan, ya, terkait dengan dulu ada yang diajukan pertama untuk

Perkara Nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021 sudah diputuskan oleh Prinsipal yang sama, ya. Kemudian, ada diajukan kembali sekarang dengan Perkara 148/PHP.BUP-XIX/2021, ya. Silakan Anda tambahkan bukti ini.

Jadi, saya akan menjelaskan sekaligus kepada Para Pihak, ya. Karena ini kasus konkret, nanti silakan juga KPU ya, dalam memberikan tanggapannya, sanggahannya, jawabannya, ya, silakan nanti ditambahkan bukti-bukti yang menguatkan satu sama lain terhadap apa yang didalilkan oleh pemohon, ya.

Pemohon juga silakan, untuk menambahkan lagi, ya, bukti-bukti yang dirasa kurang untuk menguatkan, mengapa kok ini diajukan kembali, seperti itu, ya. Oleh Prinsipal yang sama, yang telah pernah diputus oleh Mahkamah dalam Perkara Nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021. Saya merasa waktu itu, saya juga termasuk Panel Hakimnya, ya, untuk Perkara Nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021.

Kemudian, nanti dari Bawaslu juga silakan, untuk menambahkan dalam keterangannya terkait dengan proses pengawasan seperti apa, ya, yang tadi didalilkan oleh Pemohon soal tadi SKCK, apakah betul nanti di situ memang tidak sesuai dengan persyaratan ketentuan undang-undang yang ada. Ya, tambahkan sedemikian rupa, sehingga membuat bagi kita terang benderang untuk memahami kasus konkret yang diajukan oleh Pemohon, ya.

263. BAWASLU: YANI RAHMASARI

Siap, Yang Mulia.

264. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan itu disampaikan! Saya kira itu yang perlu saya tambahkan. Terima kasih, Yang Mulia pak Ketua.

265. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny. Jadi begitu ya, Pemohon.

266. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Siap, Yang Mulia.

267. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Sekarang saya ke Termohon. Termohon sudah tahu, ya, apa yang dipersoalkan oleh Pemohon?

268. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Sudah, Yang Mulia.

269. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Jadi, Pemohon pada prinsipnya tidak mempersoalkan lagi penghitungan suara. Yang dipersoalkan adalah kenapa Termohon menetapkan yang bersangkutan Pasangan Calon Nomor Urut 2, khususnya bupatinya ... calon bupatinya kok diloloskan memenuhi persyaratan? Padahal menurut Pemohon, mestinya itu tidak lolos karena tidak memenuhi persyaratan karena tidak ada SKCK-nya. Ya, SKCK-nya tidak sah, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, adada proses hukum karena calon bupati yang sekarang sudah menjadi bupati, itu ada putusan inkracht pada tanggal 24 Februari, yang bersangkutan dinyatakan melakukan tindak pidana, ya. Tapi kemudian pada tanggal 24 itu ada surat pelantikan, ya kan? Terus dilantik pada tanggal 26, itu nanti tolong Anda jelaskan persoalan itu, ya.

Bawaslu juga nanti menyampaikan, yang pertama Anda menjawab kok lolos karena yang bersangkutan masih dalam proses peradilan, ya, sampai ke Pengadilan Tinggi di Sumatera Barat. Kok bisa dapat SKCK? Sehingga ada SKCK kemudian memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon. Kemudian yang terakhir, peristiwa di akhir bulan Februari, yang bersangkutan sudah dilantik, ya kan? Padahal tanggal 24, itu sudah ada putusan yang bersifat inkracht.

270. BAWASLU: YANI RAHMASARI

Siap, Yang Mulia.

271. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti disampaikan, Bawaslu. Itu, ya? Jadi, Anda sebagai Termohon dan Bawaslu itu menjelaskan persoalan-persoalan itu. Termohon sudah tahu persis, ya?

272. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Siap, Yang Mulia.

273. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ini tolong untuk direspons. Kebetulan pihak Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pihak Terkait tidak mengajukan untuk menjadi Pihak Terkait dalam perkara ini.

Baik. Bawaslu juga sudah tahu persis, ya, duduk persoalan yang dipersoalkan oleh Termohon ... eh, Pemohon?

274. BAWASLU: YANI RAHMASARI

Siap, Yang Mulia.

275. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu, saya akan ... sebelum mengakhiri persidangan ini, saya tanya sekali lagi kepada Pemohon, masih ada yang akan disampaikan? Cukup?

276. KUASA HUKUM PEMOHON: OKTAVIANUS RIZWA

Cukup, Yang Mulia.

277. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, ya, Pak Zenwen?

278. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENWEN PADOR

Sementara cukup, Yang Mulia.

279. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup. Pak Muhammad Arif, cukup?

280. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Saya cukup, Yang Mulia.

281. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu sebelum persidangan selesai, saya akan mengesahkan bukti. Tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny, supaya kita beradu bukti di sini, ya. Jadi, Pemohon masih bisa mengajukan bukti tambahan.

282. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Siap, Yang Mulia.

283. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Dan Termohon juga mengajukan bukti yang lengkap, ya. Begitu juga Bawaslu, ya, harus mengajukan bukti-bukti yang lengkap. Yang akan disahkan pada persidangan yang akan datang. Ini sekarang bukti yang sudah ada, yang sudah diajukan oleh Pemohon, P-1 sampai dengan P-23, betul Pemohon?

284. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Ya, betul.

285. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi ini kok buktinya P-4 sama dengan bukti P-7? Dipakai salah satu saja, ya? P-4 sama P-7 itu sama bukti fisiknya.

286. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Oh, ya.

287. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha? Coba dicek? Betul, kan? Sama kan, P-4 sama dengan P-7? Salah satu saja yang dipakai, ya? Siapa ini, Pak Oktavianus atau Pak Arif?

288. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Ya.

289. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, yang dipakai bukti P-4, ya?

290. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Ya.

291. KETUA: ARIEF HIDAYAT

P-7 dicoret. Jadi, di dalam daftar P-1 sampai dengan P-23, kecuali P-7 tidak ada karena sama dengan P-4. Ya, gitu?

292. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Ya, betul, Majelis.

293. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, sudah diverifikasi, untuk itu saya sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, ada lagi yang akan disampaikan? Pemohon, cukup? Cukup, ya, Pemohon?

294. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Untuk sementara cukup, Yang Mulia.

295. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Termohon, cukup?

296. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Cukup, Yang Mulia.

297. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Bawaslu?

298. BAWASLU: YANI RAHMASARI

Cukup, Yang Mulia.

299. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kalau begitu sidang yang kedua dengan agenda untuk mendengar jawaban Termohon dan keterangan Bawaslu akan diadakan pada tanggal 18 Agustus 2021, pada hari Rabu, pada pukul 13.30 WIB. Saya ulangi, sidang kedua untuk mendengarkan jawaban Termohon dan keterangan Bawaslu akan diadakan pada hari Rabu, 18 Agustus tahun 2021 pada pukul 13.30 WIB. Ya, sudah confirm semua? Pemohon confirm, ya? Oke.

Ya, Termohon?

300. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Sudah, Yang Mulia.

301. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah.
Bawaslu sudah, ya?

302. BAWASLU: YANI RAHMASARI

Sudah, Yang Mulia.

303. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, supaya datang lebih awal, supaya bisa diperiksa antigennya. Ya, ini tadi Pak Arif itu ternyata, ya, ada persoalan reaktif, sehingga lebih baik Pak Arif itu PCR itu untuk meyakinkan betul terjangkit, atau terpapar, atau enggak itu.

304. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Ya, Yang Mulia.

305. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini kalau masuk ke Mahkamah Konstitusi berbahaya itu.

306. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARIF

Sudah, sudah keluar hasilnya, Yang Mulia.

307. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Kalau begitu, sidang sudah cukup pada hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14:39 WIB

Jakarta, 13 Agustus 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).

